

PERAN DJENANG DI DJAMBI PADA TAHUN 1900-1910

(Skripsi)

Oleh

INTAN NUR RAMADANIA

NPM. 2053033002



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

PERAN DJENANG DI DJAMBI PADA TAHUN 1900-1910

Oleh

INTAN NUR RAMADANIA

Djenang memiliki peran penting pada masa Kesultanan Djambi dan Pemerintahan Belanda. Peran utamanya yaitu sebagai pemungut pajak serta membeli dan mengumpulkan hasil hutan yang diserahkan kepada pemegang tanah, yaitu sultan pada masa Kesultanan Djambi atau Residen pada masa Pemerintah Belanda dengan harga tetap. Terdapat perbedaan peran Djenang serta peralihan sistem politik dan sistem pemerintahan masa Kesultanan Djambi dengan Pemerintahan Belanda. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910?”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode historis yang meliputi pemilihan topik, peneliti menggunakan topik yang telah dipilih; heuristik, peneliti mengumpulkan data dan sumber dari *Delpher*, *Google Scholar*, dan *University of Leiden*; kritik sumber, peneliti telah memperoleh keaslian dan kredibilitas sumber; interpretasi, peneliti menganalisis sumber yang telah dikumpulkan; dan historiografi, penulisan sejarah setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peran Djenang dan sistem pemerintahan masa Kesultanan Djambi dengan Pemerintahan Belanda. Pada Tahun 1900-1904 Djambi masih menganut sistem pemerintahan Kesultanan Djambi, dimana Djenang memiliki peran sebagai pemungut pajak dan wakil sultan serta lembaga peradilan. Sedangkan pada Tahun 1905-1906 Belanda mengubah sistem pemerintahan Kesultanan Djambi menjadi Keresidenan Djambi, dimana Djenang memiliki peran sebagai pemungutan pajak. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa wilayah Djambi memiliki perbedaan dan persamaan pada masa Pemerintah Kesultanan Djambi dengan Pemerintah Belanda.

Kata Kunci: Pajak, Peran Djenang, Sistem Politik

ABSTRACT

THE ROLE OF DJENANG IN DJAMBI IN 1900-1910

By

INTAN NUR RAMADANIA

Djenang played an important role during the Djambi Sultanate and the Dutch Government. Its main role was as a tax collector and to buy and collect forest products that were handed over to the land holder, namely the sultan during the Djambi Sultanate or the Resident during the Dutch Government at a fixed price. There were differences in the role of Djenang and the transition of the political system and government system during the Djambi Sultanate and the Dutch Government. The formulation of the problem in this study is "What was the role of Djenang in Djambi in 1900-1910?". The purpose of this study was to determine the role of Djenang in Djambi in 1900-1910. The method used in this method is the historical method which includes topic selection, researchers use selected topics; heuristics, researchers collect data and sources from Delpher, Google Scholar, and the University of Leiden; source criticism, researchers have obtained the authenticity and credibility of sources; interpretation, researchers analyze the sources that have been collected; and historiography, writing history after carrying out the previous stages. The results of this study indicate that there are differences in the role of Djenang and the government system during the Djambi Sultanate and the Dutch Government. In 1900-1904 Djambi still adopted the Djambi Sultanate government system, where Djenang had a role as a tax collector and deputy sultan and a judicial institution. While in 1905-1906 the Dutch changed the Djambi Sultanate government system to the Djambi Residency, where Djenang had a role as a tax collector. The conclusion that can be drawn is that the Djambi region has differences and similarities during the Djambi Sultanate Government and the Dutch Government.

Keywords: Tax, Role of Djenang, Political System

PERAN DJENANG DI DJAMBI PADA TAHUN 1900-1910

Oleh

INTAN NUR RAMADANIA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **PERAN DJENANG DI DJAMBI PADA
TAHUN 1900-1910**

Nama Mahasiswa : **Intan Nur Ramadania**

No. Pokok Mahasiswa : **2053033002**

Jurusan : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

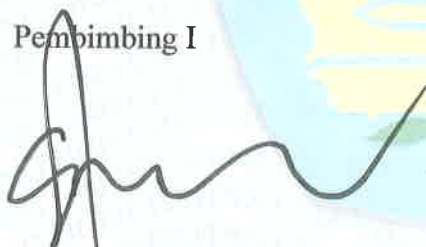
Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

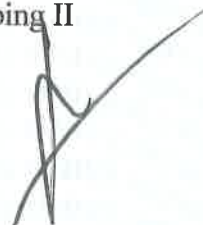
1. Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Suparman Arif, S. Pd., M. Pd.
NIP. 198112252008121001

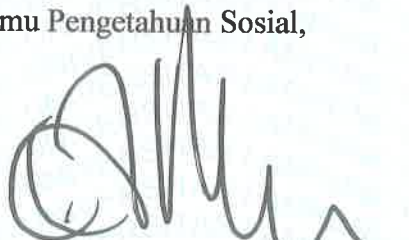
Pembimbing II



Yusuf Perdana, S. Pd., M. Pd.
NIP. 199310262019031009

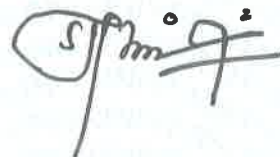
2. Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial,



Dr. Dedy Miswar, S. St., M. Pd.
NIP. 197411082005011003

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah,



Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197009132008122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.**


.....

.....

Sekretaris : **Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Bimbingan : **Drs. Syaiful M., M.Si.**


.....

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP. 19651230 199111 1001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 September 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Intan Nur Ramadania

NPM : 2053033002

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan\Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Unila

Alamat : Desa Harapan Rejo, RT. 011/RW. 003, Kecamatan
Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacukan dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 12 September 2024



Intan Nur Ramadania

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Raman Utara, pada tanggal 01 Desember 2002, anak pertama dari pasangan Bapak Hendri Eko Suratman dan Ibu Sri Suharsih. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Harapan Rejo (2008-2014), melanjutkan sekolah pertama di SMP Negeri 1 Seputih Agung (2014-2017), melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Seputih Agung (2017-2020), dan pada Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan strata 1 di Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Pada semester VI penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Kemudian pada semester VI juga penulis melaksanakan program Pengenalan Lapangan Sekolah (PLP) di SD Negeri 1 Kampung Baru, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif pada organisasi FOKMA (Forum Komunikasi Mahasiswa) Pendidikan Sejarah sebagai anggota bidang Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan Tahun 2022. Kemudian menjadi Wakil Sekretaris Umum Tahun 2023. Penulis juga aktif dalam kegiatan HIMAPIS (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial) Tahun 2020 hingga 2022.

MOTTO

**“JIKA KAMU BERBUAT BAIK KEPADA ORANG LAIN (BERARTI) KAMU
BERBUAT BAIK PADA DIRIMU SENDIRI”**

(Q. S. Al-Isra:7)

**“SETIAP MANUSIA MEMILIKI CAHAYANYA MASING-MASING,
TERUSLAH BERSINAR TERANG SAMPAI SEMESTA BANGGA AKAN
DIRIMU DAN TERUSLAH PERCAYA JIKA TIDAK UNTUK ORANG LAIN
SETIDAKNYA UNTUK DIRIMU SENDIRI”**

(BTS)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, saya persembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan sayang kepada:

Kedua orang tua saya Bapak Hendri Eko Suratman dan Ibu Sri Suharsih yang telah membesarkan saya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Terimakasih Ayah dan Ibu yang selalu ada dalam setiap langkah saya. Terimakasih untuk setiap do'a, usaha dan pengorbanan yang telah diberikan demi mendukung proses dan keberhasilan anakmu ini dalam mencapai kesuksesannya. Untuk dua orang paling berharga dalam hidup saya, sungguh semua yang Ayah dan Ibu berikan tak akan mungkin saya balas.

Untuk almamater tercinta

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi berjudul “**Peran Djenang di Djambi Pada Tahun 1900-1910**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.

7. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si., Pembahas utama pada ujian skripsi penulis, terimakasih atas ketersediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., sebagai dosen pembimbing I skripsi penulis, terimakasih bapak atas semua bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa dan bimbingan bapak di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd., sebagai dosen pembimbing II skripsi penulis, terimakasih bapak atas segala saran, masukan, ilmunya serta motivasi yang diberikan selama penulis mulai dari masuk menjadi bagian mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung sampai pada tahap akhir yaitu menyelesaikan skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.
11. Dua orang yang berjasa dalam hidup saya, Bapak Hendri Eko Suratman dan Ibu Sri Suharsih, terimakasih atas dukungan moral maupun material, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat, dan nasihat juga tanpa lelah mendukung keputusan dan pilihan di dalam hidup saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
12. Teruntuk adik kandung tersayang Ratih Nur Permatasari, terimakasih sudah menjadi penyemangat ketika lelah dan menjadi alasan pulang ke rumah.
13. Bapak M. Arman. AZ, yang telah memberikan arahan dan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
14. Teruntuk sepupu saya Jingga Puspita, Muhammad Fikri, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya, terimakasih atas segala dukungan, cinta, dan do'a yang sudah kalian berikan.
15. Teruntuk tante Susilowati dan om Edi, terimakasih telah memberikan dukungan, cinta, do'a dan arahan selama penulis melaksanakan penelitian. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.

16. Teruntuk sahabat perjuangan selama kuliah Imroah Laina Retno Mukti Kusuma, Rizky Pahlevi, Kristian Ludovikus Marbun, Mia Nurlita, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungannya selama saya menempuh pendidikan.
17. Teman-teman seperbimbingan PA, Ikhfina Aisyah Hidayat, Hesti Owallia, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
18. Teman-Teman KKN dan PLP di Desa Kampung Baru Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, terimakasih banyak atas motivasi serta kebersamaannya selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dan Pengenalan Lapangan Persekolahan.
19. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan, semua hal yang sudah kita lalui sampai sejauh ini, segala cinta, kebersamaan, dan juga kasih sayang yang kalian berikan yang tidak akan pernah saya lupakan selama melaksanakan kegiatan perkuliahan di Program Studi Pendidikan Sejarah tercinta ini.

Semoga hasil penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 12 September 2024

Intan Nur Ramadania

NPM.2053033002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6 . Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.7. Kerangka Berpikir	6
1.8. Paradigma.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Pustaka	8
2.1.1. Konsep Peran	8
2.1.2. Djenang.....	13
2.1.3. Djambi Pada Tahun 1900-1910.....	16
2.2. Penelitian Terdahulu	18
III. METODE PENELITIAN	21
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	21
3.2. Metode Penelitian.....	21
3.2.1. Pemilihan Topik	23
3.2.2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)	24
3.2.3. Verifikasi Data (Kritik).....	26
3.2.4. Interpretasi Data.....	29
3.2.5. Historiografi.....	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Hasil	31
4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Djambi	31
4.1.2. Keadaan Djambi Pada Tahun 1900-1910	44
4.1.3. Kebijakan Kesultanan Djambi.....	48

4.1.4. Kebijakan Pemerintah Belanda di Djambi	52
4.1.5. Peran Djenang di Djambi	62
4.1.5.1. Peran Djenang Pada Masa Kesultanan Djambi	67
4.1.5.1.1. Peran Djenang Sebagai Pemungut <i>Djajah</i> (Pajak)	68
4.1.5.1.2. Peran Djenang Sebagai Wakil Sultan dan Lembaga Peradilan	70
4.1.5.2. Peran Djenang Pada Masa Pemerintah Belanda	74
4.1.5.2.1. Peran Djenang Sebagai Pemungut Pajak	76
4.1.6. Keadaan Ekonomi di Djambi.....	79
4.2. Pembahasan.....	82
4.2.1. Peran Djenang di Djambi Pada Tahun 1900-1910	82
4.2.1.1. Peran Djenang di Djambi Pada Masa Kesultanan Djambi Tahun 1900-1904.....	87
4.2.2.1. Peran Djenang di Djambi Pada Masa Pemerintahan Belanda Tahun 1905-1910.....	93
V. KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Timur Sumatra Selatan Pada Peta Insulae India Orientalis in Den Atlas Sive Cosmographicae Metidationes de Fabrica Mundi oleh Gerard Mercator	17
Gambar 2. Silsilah Raja dan Sultan di Kesultanan Djambi	40
Gambar 3. Skema Penduduk Wilayah Djambi	41
Gambar 4. Suku Koeboe Djinaq	42
Gambar 5. Keluarga Koeboe Djinaq	43
Gambar 6. Tempat Tinggal Suku Koeboe Djinaq.....	44
Gambar 7. Rakyat Djambi dan Senjata Saat Perang.....	46
Gambar 8. Surat Kabar Perlawanan Pangeran Hadji Oemar Kepada Djenang Sarolangoen.....	46
Gambar 9. Pembagian Wilayah Sementara Djambi.....	55
Gambar 10. Peta Residen Djambi Dibawah Pemerintahan Belanda.....	58
Gambar 11. Staatsblad van Nederlandsch Tahun 1906 No. 261.....	59
Gambar 12. Staatsblad van Nederlandsch Tahun 1906 No. 461.....	60
Gambar 13. Staatsblad van Nederlandsch Tahun 1906 No. 286.....	61
Gambar 14. Staatsblad van Nederlandsch Tahun 1906 No. 187.....	61
Gambar 15. Staatsblad van Nederlandsch Tahun 1906 No. 259.....	62
Gambar 16. Sistem Pemerintahan Masa Sultan Thaha Syaifuddin.....	71
Gambar 18. Staatsblad van Nederlandsch Tahun 1903 No. 329.....	78
Gambar 19. Staatsblad van Nederlandsch Tahun 1905 No. 137.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Sementara Djambi dan <i>Doesoen</i>	55
Tabel 2. Rata-Rata Bea Masuk Djambi Tahun 1890-1910	82
Tabel 3. Nilai Ekspor dan Impor Djambi Tahun 1890-1910	82
Tabel 4. Perbedaan Sistem Pemerintahan Masa Kesultanan Djambi dengan Pemerintahan Belanda	95
Tabel 5. Perbedaan Djenang Masa Kesultanan Djambi dan Pemerintahan Belanda	97

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Djambi merupakan salah satu kota terpenting pada masa kolonial dan erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda (Sari, 2015). Kesultanan Djambi menjalin hubungan politik dengan Pemerintah Belanda pada abad ke-20, terbukti dengan adanya perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Kesultanan Djambi. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Belanda ikut campur dalam urusan politik Kesultanan Djambi, meskipun Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan Kesultanan Djambi. Perubahan politik pada pemerintahan Belanda terjadi setelah Sultan Thaha Syaifuddin yang tidak mengakui perjanjian tersebut, mendirikan pemerintahan pelarian di daerah Uluhan Djambi, dan gugur pada Tahun 1904. Sultan Djambi telah mengundurkan diri sejak Tahun 1901 (Kutoyo et al., 1978). Menurut Majkuri (1985), setelah Belanda memenangkan pertempuran melawan Sultan Thaha Syaifuddin di Moeara Tembesi dan Kesultanan Djambi berada di bawah kekuasaan Belanda, maka secara sah Belanda menduduki Djambi. Belanda menjadikan Djambi sebagai pusat pemerintahan di Pulau Sumatra dengan residen pertamanya ialah O.L. Helfrich pada Tahun 1906. Sejak itu Pemerintah Belanda mulai menguasai seluruh wilayah kekuasaan Djambi (Wulandari & Seprina, 2022).

Pelabuhan Djambi mempunyai peranan penting dalam perekonomian wilayah Djambi. Pada awal abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda mewajibkan masyarakatnya menanam komoditas di beberapa wilayah Keresidenan Djambi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa yang semakin meningkat. Hal tersebut menarik banyak kelompok kapitalis dan investor asing dari Inggris, Belanda, Tiongkok, Belgia, dan Amerika Serikat (Sari, 2015). Kesultanan Djambi menghadapi ketidakstabilan politik akibat perpecahan internal dan persaingan dengan kesultanan lain. Pihak kolonial Belanda menyerang Djambi. Kemudian

Djambi memakai bentuk pemerintahan tradisional yang sesuai adat setelah berada dibawah kendali penguasa Kolonial Belanda. Djambi mempunyai model pemerintahan tradisional yang disebut *doesoen* (Murdani, 2023). Pada masa Belanda, struktur pemerintahan kesultanan melebur dan Djambi menjadi salah satu wilayah kekuasaan Sumatra yang terbagi menjadi tujuh *Onderafdeeling*. Pada masa kolonial, Belanda menghapuskan Batin dan mendirikan marga pada Tahun 1906 (Suryani, 2021).

Pada dasarnya Djenang memiliki kedudukan di atas kepala *doesoen*, namun tidak memimpin sebuah wilayah yang berada di atas *doesoen*. Djenang hanya menjalankan tugas koordinasi di beberapa *doesoen* dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya (Sagala, 2020). Umumnya Djenang tidak memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat kecuali mendapatkan utusan dari pangeran (Nijhoff, 1932). Djenang bertugas mengumpulkan hasil hutan. Masyarakat diwajibkan membayar pajak dengan pendapat dalam jumlah kecil berdasarkan hasil alam hutannya dan kesuburan tanah yang dikelolanya (Sevenhoven, 1822). Setiap tahun, depati yang dipimpin oleh Djenang melakukan perjalanan mengumpulkan hasil hutan dan menyerahkannya kepada sultan atau pangeran (Royen, 1927).

Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (jabatan). Apabila seseorang melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas yang diberikan, maka ia telah memenuhi perannya. Dalam pemerintahan, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing pemerintahan (Lantaeda et al., 2017). Segala aktivitas sosial yang dilakukan oleh pelaku sosial akan menghasilkan fakta sosial yang ada di masyarakat. Menurut Sutarto, peran terdiri dari tiga komponen: konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran (Sutarto, 2009)

Pada mulanya Djenang hanyalah orang yang diutus oleh Pangeran Djambi untuk memberi tahu para pemangku kepentingannya tentang situasi dan suasana baru, namun ia bertugas sebagai pemungut pajak dan akhirnya menjadi wakil raja dengan kekuasaan yang luas (Nijhoff, 1932). Pada masa pemerintahan Sultan

Thaha Syaifuddin pada Tahun 1855 hingga 1944, Djenang menduduki jabatan di bawah sultan dan Djenang diangkat sebagai wakil sultan dan lembaga peradilan yang mengambil keputusan jika terjadi perselisihan sebelum diserahkan kepada sultan. Administrasi peradilan berada ditangan kepala keluarga, dewan, kepala daerah, Rapat Djenang dengan sultan sebagai hakim tertinggi pada tingkat peradilan. Rapat yang dipimpin oleh Djenang mempunyai pengaruh yang menentukan terhadap jalannya peradilan. Oleh karena itu, seseorang dapat membandingkan pengaduan pada saat Rapat Djenang sebelum masalah tersebut diajukan kepada sultan (Nijhoff, 1932). Ketika Pemerintah Belanda menguasai wilayah Djambi pada Tahun 1906, terjadi perubahan struktur pemerintahan. Pada masa Pemerintahan Belanda, pemerintah daerah Djambi tidak lagi mengakui adanya hierarki pemerintah di atasnya, dan dipimpin oleh pemimpin adat yang dipilih oleh masyarakat adat atau diturunkan secara turun temurun. Demikian pula mengenai kedudukan Djenang yang menghubungkan wilayah pajak setiap *doesoen* dengan kesultanan, kedudukan tersebut hanya merupakan petugas operasional, bukan merupakan struktur pemerintahan daerah Djambi (Sagala, 2020).

Djenang memegang peran penting di Kesultanan Djambi pada masa Sultan Thaha Syaifuddin. Sebelum Pemerintah Belanda menguasai Djambi, Djenang berperan sebagai pemungut pajak dan peradilan tertinggi. Pada masa Sultan Syaifuddin, Djenang merasa berada dibawah kekuasaan raja. Sultan Thaha Syaifuddin mengundurkan diri dari Kesultanan Djambi pada Tahun 1901 ketika terjadinya perlawanan antara Kesultanan Djambi dengan Belanda. Pada Tahun 1904, Belanda berhasil mengalahkan Kesultanan Djambi. Djambi mengalami perubahan sistem politik dan pemerintahan setelah Pemerintahan Belanda. Pada masa Sultan Thaha Syaifuddin, peran Djenang adalah sebagai pemungut pajak dan wakil sultan yang mengambil keputusan tentang keadilan, namun berubah menjadi pemungut pajak dan tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan tentang keadilan setelah Belanda menguasai. Peraturan yang berlaku ditetapkan oleh Pemerintah Belanda. Kedudukan Djenang yang menghubungkan *doesoen* di daerah pedalaman dengan kesultanan hanya sebatas petugas operasional dan bukan sebuah struktur pemerintah daerah Djambi. Berdasarkan arsip Djambi yang ditulis

oleh Tideman, 1938, Djenang diangkat sebagai wakil raja yang bertujuan untuk mengumpulkan upeti (pajak) dan untuk administrasi umum di Djambi. Pada saat Rapat Batin, Djenang terlibat dalam menjalankan pemerintahan dan menjalankan keadilan atas nama sultan. Jika terdapat kasus yang sulit diselesaikan maka dibawa kepada sultan. Menurut arsip majalah *Koloniaal Tijdschrift, jrg 1930* yang diterbitkan oleh *Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indie's-Gravenhage*, pada Tahun 1902 Djenang berperan membeli dan mengumpulkan hasil hutan yang diserahkan kepada pemegang tanah sultan dengan harga tetap. Djenang datang ke daerah pajak tersebut sekitar 3 sampai 4 bulan sebelum memungut pajak dan hasil hutannya.

Pada masa Kesultanan Djambi, dibawah pimpinan Sultan Thaha Syaifuddin pada Tahun 1855-1904, Djenang diperintah oleh sultan yang mempunyai kekuasaan memungut pajak dan membawa berita ke daerah Djambi. Sultan Thaha Syaifuddin sangat menentang perjanjian yang ditawarkan Belanda, karena tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan Belanda. Oleh karena itu, Belanda sangat marah kepada Sultan Thaha Syaifuddin. Terjadilah perlawanan antara Sultan Thaha Syaifuddin dengan Belanda yang berakhir dengan wafatnya Sultan Thaha Syaifuddin pada Tahun 1904. Belanda resmi menguasai Djambi pada Tahun 1906. Pemerintah Belanda mengubah pemerintahan dan pejabat yang sebelumnya dibentuk oleh Sultan Thaha Syaifuddin. Menurut peraturan pemerintah Kesultanan Djambi dan dilanjutkan oleh Pemerintahan Belanda, Djenang tidak boleh berasal dari daerah yang sama. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan mengkaji terkait peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peran Djenang di Djambi pada Suku Melayu dan Suku Anak Dalam (Suku Koeboe).
2. Perbedaan peran Djenang di Djambi masa Kesultanan Djambi dengan Pemerintahan Belanda.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi permasalahan ini mengenai Djenang terhadap Suku Anak Dalam (Suku Koeboe).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, di dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910.

1.6. Manfaat Penelitian

Terdapat dua jenis manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pemikiran mengenai konsep-konsep dalam bidang kesejarahan, khususnya mengenai peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910, serta memperkaya sumber khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Lampung

Membantu para civitas akademika lainnya untuk dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910.

2. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam mengkaji mengenai peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910 untuk tambahan khazanah ilmu pengetahuan.

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang kesejarahan, yaitu mengenai peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910.

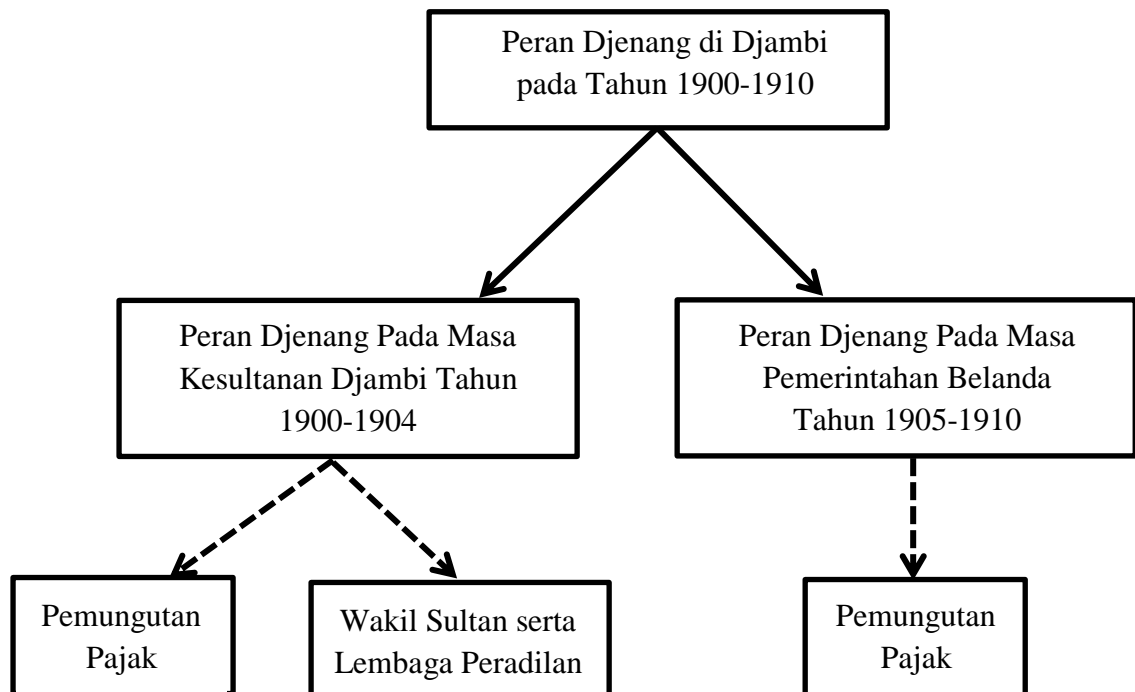
1.7. Kerangka Berpikir

Kedudukan Djenang sudah ada sebelum Djambi menjadi wilayah tersendiri. Sejak dahulu, Kesultanan Djambi telah membangun hubungan baik dengan Suku Koeboe yang termasuk penduduk asli *Zuid-Sumatra* yang hidupnya secara nomaden. Suku ini sering disebut dengan Suku Anak Dalam (Orang Rimba), karena menduduki wilayah pedalaman di *Zuid-Sumatra*. Berdasarkan pemerintahan wilayah Djambi, Suku Koeboe mayoritas menetap di desa-desa dan mereka terbagi menjadi 2 kelompok yaitu Koeboe Djinaq atau Koeboe Laoet dan Koeboe Kesit atau Koeboe darat. Selain itu, pada masa sultan Djambi, Djenang menjabat sebagai otoritas peradilan dan pemungut pajak tertinggi di bawah sultan. Setiap Djenang memungut pajak di *doesoen-doesoen* yang telah diberikan oleh sultan. Pada Tahun 1615 ketika masa Sultan Abdul Kahar, Belanda datang ke Djambi. Belanda mengikuti peraturan-peraturan Kesultanan Djambi yang berlaku. Pada Tahun 1858, di bawah kekuasaan Sultan Thaha Syaifuddin Belanda secara resmi melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Djambi. Pada masa Sultan Thaha Syaifuddin, kedudukan Djenang berada dibawah kekuasaan sultan, sebagai wakil sultan dan lembaga peradilan Namun pada Tahun 1900, Sultan Thaha Syaifuddin mengaku mundur dari perlawanan Belanda. Pada Tahun 1904 secara resmi Kesultanan Djambi mengaku kalah atas perlawanan Belanda. Seiring berjalannya waktu, Tahun 1906 Belanda merubah sistem pemerintahan Kesultanan Djambi.

Pada masa Belanda, pemerintahan daerah Djambi tidak lagi mengenal sistem pemerintahan di atasnya, serta dikepalai oleh pemimpin adat yang dipilih oleh masyarakat adat atau diwariskan secara turun temurun. Demikian juga dengan jabatan Djenang yang menghubungkan *doesoen* di daerah pajak dengan kesultanan, jabatan tersebut hanya merupakan petugas operasional. Pada masa Pemerintahan Belanda, Djenang meneruskan tugas yang telah diperintahkan pada

masa Kesultanan Djambi, yaitu tetap menjalin hubungan masyarakat Suku Koeboe Djinaq atau Koeboe Laoet untuk mengumpulkan hasil hutan. Selaras dengan hal tersebut, maka peneliti akan menggunakan Teori Peran menurut Sutarto yang mencakup 3 konsep utama, yaitu perencanaan peran (konsepsi), tujuan peran (harapan), dan pelaksanaan peran. Dengan teori tersebut, maka peneliti akan berfokus untuk mengkaji peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910.

1.8. Paradigma



Keterangan: ———→ (Garis Hubungan)

- - - → (Garis Pengaruh)

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan tertulis yang dilakukan peneliti sebagai langkah awal dalam mengumpulkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti (Nur & Uyun, 2020). Tinjauan pustaka mengacu pada tinjauan tertulis terhadap sesuatu hal yang diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini, tinjauan pustaka akan terfokus pada satu topik tanpa menggunakan metodologi yang dilakukan untuk menilai maupun mengutipnya. Terdapat beberapa tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

2.1.1. Konsep Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dari kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Pada hakikatnya peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang dihasilkan dari menduduki suatu jabatan tertentu (Soekanto, 2002). Dengan peran tersebut maka seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat akan berperilaku sesuai dengan masyarakat atau lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai tuntunan yang diberikan secara struktural (norma, harapan, tabung, tanggung jawab, dan lain-lain). Pada hakikatnya peran dapat dirumuskan sebagai rangkaian perilaku seseorang yang dihasilkan akibat memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran merupakan seperangkat perilaku seseorang terhadap kelompok besar maupun kecil. Kedudukan tersebut tentunya memiliki peran yang berbeda-beda tergantung pada kedudukan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun rendah (Lantaeda et al., 2017). Peneliti menemukan bahwa peran adalah sikap seseorang dalam kedudukan atau status tinggi (Djenang) yang diharapkan oleh banyak orang, pejabat

yang kebijakannya ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama oleh individu atau kelompok masyarakat.

Menurut Sutarto, peran adalah pengaruh yang diharapkan seseorang didalam dan diantara hubungan sosial, serta pengaruh yang berkaitan dengan status atau kedudukan sosial. Peran ini mulai berlaku apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya. Sutarto mengungkapkan ada tiga unsur dalam sebuah peran, yaitu perencanaan peran (konsepsi), tujuan peran (harapan), dan pelaksanaan peran (Sutarto, 2009). Jika ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. Selaras dengan hal tersebut, maka peneliti akan mengaitkan teori peran yang dikemukakan oleh Sutarto ke dalam kajian peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910.

1. Perencanaan Peran

Perencanaan adalah segala kegiatan yang tujuannya untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan ini meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan serta dianggap untuk mencapai hasil terbaik (Taufiqurokhman, 2008). Menurut Bryant dan White (1982), menyatakan bahwa perencanaan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan dengan beberapa implikasi berupa pemberi perhatian terhadap kapasitas, segala yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan (Afifah, 2019). Perencanaan adalah sebuah tolak ukur untuk mempermudah tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam lembaga di masyarakat (Sasoko, 2022).

Perencanaan peran ini dapat diartikan sebagai konsepsi peran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah ide

atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang sebenarnya (konkret). Konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili suatu objek, kejadian, kegiatan atau hubungan yang memiliki karakter yang sama (Sagala, 2010). Menurut Soedjadi, konsep memiliki hubungan erat dengan definisi. Menurutnya, konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek, yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Lain halnya dengan definisi, yang hanya bersifat membatasi makna untuk mengungkapkan keterangan atau ciri dari suatu realitas (Soedjadi, 2000).

Berdasarkan pengertian perencanaan di atas, peneliti menyatakan bahwa perencanaan adalah sebuah strategi untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, menentukan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang mempengaruhi masa depan dengan beberapa implikasi. Perencanaan ini dapat diartikan juga sebagai konsep. Konsep merupakan sebuah ide yang mewakili suatu kejadian atau kegiatan yang memiliki hubungan dengan karakter seseorang yang digunakan untuk suatu objek atau kepentingan pada umumnya.

Perencanaan peran merupakan keyakinan seseorang tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu (Sutarto, 2009). Perencanaan merupakan perwujudan interpretasi terhadap objek tertentu. Rencana setiap orang tentu akan berbeda dengan rencana orang lain, karena setiap orang mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Seseorang yang menduduki suatu jabatan dalam masyarakat mau tidak mau mempunyai peran dan pemahaman yang berbeda-beda tergantung kedudukannya. Djenang menjabat sebagai wakil sultan, menurut arsip *Sumatra* yang ditulis oleh Nijhoff, Djenang berperan sebagai pemungut pajak dan

penyelesaian konflik di wilayah Djenang, karena Sultan mempercayai Djenang sebagai wakil sultan.

2. Tujuan Peran

Menurut Peterson dan Seligman (2004), tujuan secara konsep tinjauan psikologis artinya seperangkat kognitif atau proses berfikir positif yang ditujukan untuk mencapai suatu sasaran. Seseorang yang memiliki tujuan tentu akan memiliki upaya yang lebih dalam mencapai sasaran daripada harapan berkurang (Muniroh, 2018). Snyder (2002) menyatakan bahwa tujuan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapai sasaran yang diinginkan, bersamaan dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Berdasarkan Snyder, Irving, & Anderson (1999), menjelaskan tujuan adalah keadaan termotivasi yang positif didasarkan pada hubungan interaktif antara *agency* (energi yang mengarah pada tujuan) dan *pathway* (rencana untuk mencapai tujuan) (Habibah, 2018). Berdasarkan pengertian tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan adalah proses berfikir positif untuk mencapai suatu sasaran bersamaan dengan motivasi yang dimiliki, sehingga seseorang tersebut termotivasi yang positif berdasarkan hubungan pada energi yang mengarah pada sasaran dengan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut.

Sasaran peran adalah harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki jabatan tertentu mengenai bagaimana orang tersebut harus bertindak (Sutarto, 2009). Sasaran peran diberikan kepada mereka yang menempati kedudukan sosial seperti Djenang. Djenang kemudian berperan mewujudkan harapan tersebut. Masyarakat Djambi mengelola tanah dan kebun yang disewakan oleh sultan. Hasil kebunnya kemudian diberikan kepada Djenang dan ditukar dengan barang sehari-hari seperti pakaian. Selain itu, tugas Djenang adalah menyelesaikan konflik yang ada di

masyarakat Djenang. Harapan masyarakat, konflik tersebut bisa diselesaikan secara adil tanpa melibatkan sultan Djambi.

3. Pelaksanaan Peran

Menurut Bintoro Tjokroadmidjojo, pelaksanaan adalah sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, kebijakan diturunkan dari suatu agenda dan rencana guna mencapai suatu tujuan (Maru'ao, 2023). Berdasarkan Westra, pelaksanaan dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya (Adisasmita, 2011). Pelaksanaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan atau kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan guna mencapai suatu tujuan.

Pelaksanaan peran merupakan perilaku aktual seseorang yang menduduki jabatan tertentu (Sutarto, 2009). Tentu saja pelaksanaan peran harus sesuai dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat, yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Pelaksanaan peran Djenang menjabat sebagai wakil sultan dan pemungut pajak pada masa Kesultanan Djambi. Djenang mempunyai peran ganda pada masa kesultanan, dalam menjalankan peran tersebut harus mengikuti aturan dan norma adat yang berlaku di masyarakat. Dalam masyarakat peran dianggap sangat penting karena mengatur tingkah laku seseorang berdasarkan norma.

Peran menurut Bruce J. Cohen, memiliki beberapa jenis sebagai berikut: (Afriadi, 2018)

1. Peran nyata (*Enacted Role*), yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peran yang dianjurkan (*Prescribed Role*), yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peran tertentu.
3. Konflik peran (*Role Conflict*), yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peran (*Role Distance*), yaitu pelaksanaan perana secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*), yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
6. Model peran (*Role Model*), yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita ikuti, tiru, atau contoh.
7. Rangkaian atau lingkup peran (*Role Set*), yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia yang sedang menjalankan perannya.

Menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu (Soekanto, 2010).

1. Peran dasar (*Role Basic*), yaitu peran yang selalu penting di dalam setiap situasi sosial maupun fisik, peran ini tidak dapat diubah.
2. Peran umum (*Role Generalized*), yaitu suatu peran yang mencakup situasi yang sangat luas.
3. Peran yang menjiwai (*Role Internalized*), yaitu peran yang menjiwai diri seseorang.

2.1.2. Djenang

Kata Djenang berasal dari Bahasa Melayu yang artinya gelar dan pengawas atau orang yang mengawasi, gelar tersebut diberikan oleh sultan pada Kesultanan Melayu Djambi (Ronkel, 1930). Djenang adalah status

struktural yang sudah ada sejak masa Kesultanan Djambi. Suatu bentuk pelegitimasi kekuasaan dalam sebuah Kesultanan Djambi lebih besar melalui perantara Djenang (Prasetijo, 2018). Berdasarkan pengertian Djenang di atas, peneliti dapat mendeskripsikan Djenang adalah gelar atau pengawas yang memiliki status struktural dalam Kesultanan Djambi. Djambi pada masa kesultanan termasuk dalam daerah melayu.

Djenang sudah ada di Djambi sejak masa Kesultanan Djambi yaitu pada masa kepemimpinan Panembahan Rantau Kapas Tahun 1515-1540. Pada masa itu, raja Djambi yaitu Panembahan Rantau Kapas mengutus Djenang ke Koerintji untuk meminta pajak. Namun mereka menolak karena merasa bukan bagian dari masyarakat Djambi melainkan bagian Pagaruyung. Oleh karena itu, terjadilah perlawanan antara Koerintji dan Djambi pada Tahun 1524-1526. Dalam perlawanan tersebut Koerintji kalah dari Djambi hingga diadili oleh Kesultanan Djambi. Sejak itu Djambi sudah mengambil pajak di masyarakat melalui Djenang (Supian et al., 2018).

Djenang memiliki persamaan dan perbedaan dalam suatu wilayah *Zuid-Sumatra*, persamaan peran Djenang yaitu sebagai pemungut pajak. Adapun persamaan peran Djenang pada wilayah Djambi dan Palembang yaitu sebagai penghubung Suku Anak Dalam dan Suku Melayu dengan kesultanan. Sedangkan di Lampongsche Djenang berperan sebagai pengawasan budidaya perkebunan di Lampongsche. Djenang mempunyai peran di Kesultanan Djambi, khususnya sebagai wakil sultan (dewan peradilan) dan pemungut pajak. Djenang tidak bisa berasal dari daerah yang sama walaupun mempunyai peran yang sama. Djenang dilantik berdasarkan rekomendasi Rapat Batin untuk urusan administrasi Kesultanan Djambi. Jika ada permasalahan yang sulit diselesaikan sebelum dibawa ke sultan, Djenang akan mengadili terlebih dahulu atas nama sultan (Tideman, 1938). Sejak masa Kesultanan Djambi, peran Djenang sudah memungut pajak dari masyarakat, termasuk masyarakat Suku Anak Dalam (Orang Rimba) atau Suku Koeboe yang menduduki wilayah Djambi. Jika melihat peran Djenang dalam pemungutan pajak, maka cara mendapatkan pajak dengan

menjalankan *serah*, yaitu pertukaran hasil bumi dengan barang dagangan dari luar (Prasetijo, 2018).

Kesultanan Djambi berawal dari raja Si Pahit Lidah dan digantikan oleh Tun Telani. Setelah Tun Telani meninggal digantikan oleh Puteri Selaro Pinang Masak anak dari Raja Adityawarman berasal dari Kerajaan Minangkabau. Puteri Selaro Pinang Masak memimpin Djambi Tahun 1460-1480 (Sumarni, 2022). Puteri Selaro Pinang Masak menikah dengan Datuk Paduka Berhala dipandang sebagai proses awal penyebaran Islam di Djambi (Muzakir, 2013). Silsilah raja dan sultan Djambi sebagai berikut: (Hasselt, 1882).

1. Puteri Selaro Pinang Masak (1460-1480).
2. Orang Kayo Hitam (1500-1515).
3. Panembahan Rantau Kapas (1515-1549).
4. Panembahan Rengas Pandak (1540-1565).
5. Panembahan Bawah Sawo (1565-1590).
6. Panembahan Kota Baru (1590-1615).
7. Sultan Abdul Kahar (1615-1643).
8. Sultan Abdul Jalil (1643-1665).
9. Sultan Sri Ingologo (1665-1690).
10. Sultan Kiai Gede (1690-1696).
11. Sultan Maharaja Batu (1690-1721).
12. Sultan Muhammad Syah (1696-1740).
13. Sultan Istra Ingologo (1740-1770).
14. Sultan Anom Sri Ingologo (1776-1790).
15. Sultan Ratu Sri Ingologo (1790-1812).
16. Sultan Agung Sri Ingologo (1819-1821).
17. Sultan Muhammad Fakhrudin (1883-1841).
18. Sultan Thaha Syaifuddin (1855-1904).

Kesultanan Djambi resmi runtuh pada Tahun 1904 dan berdirilah Keresidenan Djambi dibawah pimpinan Belanda pada Tahun 1906. Kebijakan yang dibuat pada masa Belanda adalah menyatukan hukum adat masyarakat berdasarkan tempat tinggalnya. Banyak perubahan yang terjadi

terutama pada kebijakan yang dilakukan Pemerintah Belanda di bidang politik (Wulandari et al., 2022). Sebelum Belanda menguasai Kesultanan Djambi, tata pemerintahan di wilayah Djambi pada masa Sultan Thaha Syaifuddin, yaitu 1) Raja; 2) Djenang; 3) Tumenggung; 4) Batin; dan 5) Rakyat (Sagala, 2020). Djenang pada masa sultan masih memiliki peran untuk menarik pajak dan orang yang mewakili raja, serta menyelesaikan berbagai permasalahan konflik ditingkat lokal. Sejak Pemerintahan Belanda terjadi perubahan struktur pemerintahan. Tata Pemerintahan Belanda, yaitu 1) Residen; 2) Kepala *Afdeeling*; 3) Kepala *Onderafdeeling*; 4) Demang; 5) Kepala adat/pasirah; 6) Kepala *doesoen*; dan 7) Rakyat. Residen Djambi pada masa Pemerintahan Belanda adalah O. L. Helfrich (1906-1908), A. J. N. Engelberg (1908-1910), Th. A. L. Heyting (1910-1913), AL. Kamerling (1913-1915), H. E. C. Quast (1915-1918), H. I. C. Petri (1918-1923), C. Poortman (1923-1925), G. J. Van Dongen (1925-1927), H. E. K. Ezerman (1927-1928), J. R. F. Verschoor Van Niesse (1928-1931), W. S. Teinbucs (1931-1933), Ph. J. Van Der Meulen (1933-1936), M. J. Ruyschaver (1936-1940), dan Reuvers(1940-1942) (Ardita & Rukmana, 2023).

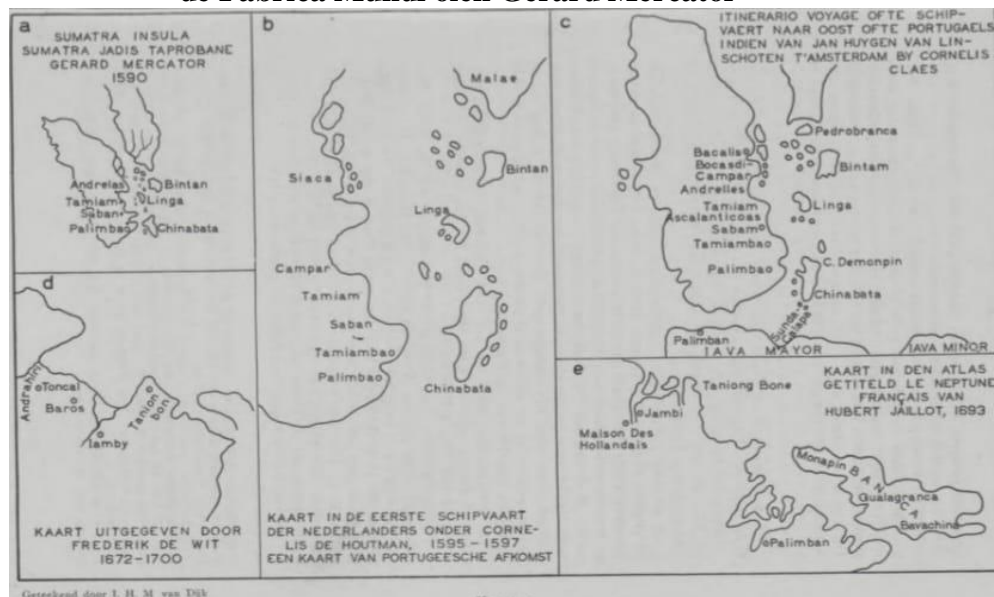
Djambi mengalami perubahan politik pada masa Kesultanan Djambi dan Pemerintahan Belanda. Belanda resmi menguasai Djambi pada Tahun 1906, mengubah struktur pemerintahan sesuai keinginan Belanda. Dengan adanya perubahan struktur pemerintahan, peran Djenang dibawah pemerintahan Belanda pun berubah. Di Kesultanan Djambi, Djenang berperan sebagai pemungut pajak dan menyelesaikan berbagai permasalahan konflik sebagai wakil sultan. Sedangkan pada masa Pemerintahan Belanda, Djenang hanya sebagai pemungut pajak yang kemudian akan diberikan kepada Belanda.

2.1.3. Djambi Pada Tahun 1900-1910

Pada abad Pertengahan, para ahli geografi telah menyadari sebuah fakta bahwa terdapat teluk-teluk di pantai timur Sumatra dekat dengan Djambi dan Palembang. Pada periode awal dalam sejarah, daratan-daratan telah menembus lebih dalam dan lebih besar sehingga tertimbun lumpur. Pada

abad pertengahan, masih terdapat sebagian muara dan teluk pedalaman pada wilayah-wilayah *Zuid-Sumatra* (Obdeijn, 1942). Sejak abad Pertengahan Djambi sudah masuk pada wilayah *Zuid-Sumatra*, Djambi bergabung dengan wilayah Palembang yang masih berupa daratan-daratan dan masih dihuni oleh masyarakat asli Sumatra.

Gambar 1. Peta Timur Sumatra Selatan Pada Peta Insulae India Orientalis in Den Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi oleh Gerard Mercator



(Sumber: Obdeijn, 1942)

Pada abad ke-19, Djambi menjadi bagian wilayah administratif Palembang. Pada abad ke-19, *Zuid-Sumatra* memiliki 3 wilayah utama yang menjadi wilayah administratif pada masa itu, yaitu Palembang (termasuk Djambi), Benkoelen, dan Lampongsche. Palembang memiliki luas 84.692 KM². Palembang memiliki 4 *afdeeling*, yaitu Palembangsche Benedenlanden, Palembangsche Bovenlanden, Ogan di Komerling Oeloe, dan Rawas (Richter, 1910). Djambi masuk ke dalam wilayah *afdeeling* Rawas dengan ibukota Sarolangoen.

Pada akhir abad ke-20, Djambi belum seutuhnya jatuh ke tangan Belanda. Menurut Suwondo (1979), pada akhir abad ke-20 kekuasaan tertinggi masih berada di tangan seorang sultan dibantu oleh seorang Pangeran Ratu. Kesultanan Djambi berakhir pada Tahun 1904 ketika Sultan Thaha Syaifuddin wafat dan Belanda berhasil menumpas perlawanan rakyat

Djambi. Demikian pula kekuasaan Kesultanan Djambi diambil alih oleh Belanda dan berada dibawah kepemimpinan Belanda (Ardita & Rukmana, 2023). Djambi merupakan kota penting pada masa pemerintahan Belanda dan tidak dapat dipisahkan dari politiknya. Bahkan perkebunan karet pertama di Djambi dibuka pada Tahun 1904 di *Afdeeling* Moeara Tembesi. Pada periode berikutnya, Tahun 1900-1914 Djambi menjadi penghasil karet terbesar. Selain sektor perkebunan, perekonomian Djambi bertumpu pada hasil pertambangan seperti minyak dan emas (Sari, 2015).

Kesultanan Djambi sebelum dikuasai Belanda mempunyai kedudukan struktural. Namun sejak pemerintah Belanda menguasai Kesultanan Djambi, wilayah ini berubah menjadi wilayah administratif yang dipimpin residen. Pada Tahun 1906 masa Pemerintahan Belanda Kesultanan Djambi berubah menjadi Keresidenan Djambi. Pembagian wilayah *Zuid-Sumatra* telah menjadi beberapa wilayah yaitu Djambi, Palembang, Benkoelen, dan Lampongsche (Beck, 1919). Menurut Suwondo (1979), Kesultanan Djambi berada pada Tahun 1906 menurut *Indische Staatsblad* 1906 No. 187. Dalam pembagian wilayah terbagi menjadi 7 bagian, yaitu Djambi, Moeara Tembesi, Moeara Tebo, Moeara Bangko, Sarolangoen, dan Kerinci (Ardita & Rukmana, 2023). Seluruh struktur pemerintahan di Djambi diatur berdasarkan peraturan Pemerintah Belanda. Namun Belanda juga tetap mengakui bentuk-bentuk asli masyarakat lokal, termasuk marga. Marga merupakan bentuk pemerintahan yang berada dibawah residen pada masa Belanda. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Djambi, marga disamakan dengan Negeri yang dipimpin Batin (Erdianto, 2010).

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Irmawati Sagala (2020)

Peneliti yang dilakukan Irmawati Sagala memfokuskan penelitiannya terhadap Islam dan Adat dalam Sistem Pemerintah Jambi Masa Kesultanan dan Kolonial Pada Tahun 1855-1942.

Berikut pendapat perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Irmawati Sagal dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah sama-sama membahas mengenai peran Djenang pada masa Kesultanan Djambi hingga masa Pemerintah Belanda.
 - b. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu peran Djenang di Djambi dengan rentang waktu Tahun 1855-1942 pada bidang agama dan budaya. Sedangkan penelitian yang akan dikaji yaitu peran Djenang yang berfokus pada bidang sosial dan ekonomi pada Tahun 1900-1910.
2. Penelitian oleh Wina Syandra Suryani (2021)
- Peneliti yang dilakukan Wina Syandra Suryani memfokus penelitiannya terhadap Peran Rio dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi pada Masa Keresidenan Belanda (1906-1925).

Berikut pendapat perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Wina Syandra Suryani dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah peran Djenang di Djambi sebagai pemungut pajak setiap *doesoen* pada masa Pemerintahan Belanda.
 - b. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu peran Djenang pada masa Pemerintahan Belanda pada Tahun 1906. Sedangkan penelitian yang akan dikaji yaitu peran Djenang runtuhnya Kesultanan Djambi hingga awalnya Pemerintahan Belanda pada Tahun 1900-1910.
3. Penelitian oleh Mustika Ayu Wulandari, Dkk (2022)
- Peneliti yang dilakukan oleh Mustika Ayu Wulandari, Dkk penelitian berfokus terhadap Pemerintahan dan Politik Etis serta Penerapannya di Jambi.

Berikut pendapat perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Mustika Ayu Wulandari, Dkk dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah peran Djenang di Djambi pada masa Pemerintahan Belanda, serta kedudukan Djenang pada masa tersebut.
- b. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti ini adalah kedudukan dan peran Djenang di Djambi tidak dijelaskan secara rinci, hanya menjelaskan sistem pemerintahan yang diterapkan Belanda di Djambi yaitu sistem Pemerintah Kesultanan menjadi keresidenan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang Lingkup dalam penelitian ini meliputi:

- a. Objek Penelitian : Djambi pada Tahun 1900-1910
- b. Subjek Penelitian : Peran Djenang
- c. Tempat Penelitian : *Google Scholar*
Delpher
University of Leiden
- d. Waktu Penelitian : 2023-2024
- e. Temporal Waktu : 1900-1910
- f. Bidang Ilmu : Ilmu Sejarah

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang secara khusus mengkaji tentang sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan suatu prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji tentang penelitian yang akan dilakukan. Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menganalisis secara kritis dokumen dan peninggalan masa lampau. Dengan menggunakan metode sejarah, peneliti mencoba merekonstruksi sebanyak mungkin sumber-sumber tentang masa lampau. Masa lampau yang digambarkan sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi (Notosusanto, 1975). Menurut Kuntowijoyo metode sejarah meliputi proses menelusuri sumber-sumber untuk menciptakan peristiwa sejarah dan menyajikannya dalam karya sejarah, maka metodologi sejarah adalah ilmu yang melibatkan lebih jauh tentang kebenaran metode tersebut (*science of method*) (Wasino & Hartatik, 2018). Menurut Gilbert J. Garraghan, metode sejarah adalah seperangkat prinsip dan aturan sistematis yang dirancang untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber

sejarah secara efektif, mengevaluasinya secara kritis, dan membuat sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis (Wardah, 2014). Penelitian sejarah memiliki tahapan-tahapan yang sistematis dan sesuai dengan kaidahnya untuk mengkaji secara ilmiah. Tahap penelitian sejarah menurut (Sumargono, 2021) terdiri dari lima tahap, yaitu:

1. Pemilihan topik adalah langkah awal penelitian untuk menentukan suatu masalah atau kajian yang akan digarap dalam karangan, topik yang sudah menyempit langsung akan dibuat judul.
2. Pengumpulan sumber (heuristik) adalah tahap yang digunakan dalam peneliti dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang tersebar dan terdiversifikasi.
3. Verifikasi (kritik sejarah) adalah upaya peneliti untuk mendapatkan otentitas dan kredibilitas sumber sejarah.
4. Interpretasi (analisis dan sintesis) adalah langkah peneliti dalam penafsiran dan menganalisis fakta-fakta sumber yang sudah valid pada tahap kritik sejarah.
5. Historiografi (penulisan sejarah) adalah langkah terakhir dalam penelitian sejarah untuk menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi dan hasil penafsiran dituliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras.

Berdasarkan lima tahapan yang dijelaskan di atas, maka peneliti harus dapat menguasai tentang metode penelitian sejarah. Sifatnya yang sistematis, setiap tahapan pada metode penelitian sejarah tidak dapat dibalik dan harus mengutamakan urutan mulai dari pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik), interpretasi, dan historiografi. Dalam metode penelitian sejarah disebutkan bahwa seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan (Zulaicha, 2014). Terdapat prosedur analisis di dalam metode historis yaitu suatu cara untuk menganalisa dokumen-dokumen yang ada sebagai bukti yang didapat dan dipercaya mengenai masa lampau manusia (Hugiono & Poerwantana, 1992). Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah secara tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selaras dengan hal

tersebut, melalui tahapan-tahapan metode penelitian sejarah, peneliti akan menghasilkan pemahaman maupun pengetahuan secara komprehensif. Metode penelitian sejarah akan dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

3.2.1. Pemilihan Topik

Kuntowijoyo mengatakan pemilihan topik merupakan urutan pertama dalam penelitian sejarah karena topik yang akan dijadikan penelitian sejarah itu cukup banyak sehingga penting bagi peneliti untuk menemukan topik terlebih dahulu (Sukmana, 2021). Topik adalah suatu masalah atau kajian yang akan dibahas dalam karangan, topik yang sudah dibatasi dapat menjadi judul. Judul harus mencerminkan isi tulisan dan dirumuskan dengan jelas, singkat, relevan, dengan isi tulisan tetapi tidak terlalu provokatif. Memilih topik harus memperhatikan empat kriteria, yaitu nilai (*value*) topik, keaslian (*originality*), kepraktisan (*practicality*), dan kesatuan (*unity*) (Sumargono, 2021).

1. Nilai (*value*), topik harus memberikan penjelasan atau aspek pengalaman manusia yang bermakna dan universal, melalui pendekatan kasus atau dengan menunjukkan hubungannya dengan gerakan yang lebih luas.
2. Keaslian (*originality*), topik yang dipilih harus baru. jika penelitian telah dikaji, peneliti harus menyajikan fakta dan penjelasan baru (belum dikaji).
3. Kepraktisan (*practicality*), topik yang diangkat peneliti menyangkut kemudahan memperoleh sumber dan kemampuan menggunakannya. Saat memilih topik, peneliti harus memperhatikan ruang lingkupnya.
4. Kesatuan (*unity*), setiap penelitian pasti memiliki kesatuan tema atau tujuan menuju suatu pernyataan atau proporsi pemersatu, yang akan memberi peneliti titik tolak, arah menuju tujuan tertentu dan adanya harapan yang akan memberikan suatu kesimpulan tertentu.

Peneliti dalam skripsi ini telah menentukan topik yang akan dikaji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Topik yang akan menjadi kajian pada

skripsi ini adalah peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910. Topik yang dipilih oleh peneliti telah diselaraskan sesuai dengan empat kriteria menurut (Sumargono, 2021), yaitu topik yang dipilih oleh peneliti belum dikaji oleh peneliti lainnya. Tema yang dikaji oleh peneliti memiliki ruang lingkup penelitian berupa objek, subjek, tempat penelitian, temporal waktu, dan bidang ilmu.

3.2.2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Setelah pemilihan topik dilakukan, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah (heuristik). Heuristik dapat diartikan sebagai penelusuran sumber-sumber sejarah, penelusuran sumber ini tahap terpenting pada metode sejarah. Heuristik merupakan tahapan awal dari sebuah penelitian sejarah dan juga merupakan dasar bagi rekonstruksi sebuah peristiwa (Padiatra, 2020). Mencari sumber dan mengumpulkan sumber sebagian besar dilakukan melalui kegiatan bibliografi berarti publikasi yang memutar daftar dokumen baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun artikel majalah atau bentuk keperpustakaan lain yang berhubungan dengan bidang sejarah (Sumargono, 2021). Menurut Laksono heuristik adalah tahapan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber untuk dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan penelitian (Sukmana, 2021). Selaras dengan hal tersebut, maka peneliti telah berupaya mengumpulkan data atau sumber sejarah, yaitu:

1. Sumber tulisan

Sumber tulisan akan dibagi menjadi dua penelitian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Para peneliti akan mencantumkan keduanya sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer yang didapatkan oleh peneliti berasal dari arsip situs web, yaitu *delpher.nl*. sumber primer peneliti, sebagai berikut:

- 1) Arsip buku karya J. W. J. Wellan (1932), *Zuid-Sumatra Economisch Overzicht*.
- 2) Arsip buku karya Herbert Campen (1939), *De Regeling van Het Rechtswezen in De Buitengewesten*.
- 3) Arsip buku karya J. Tideman (1938), *Djambi*.
- 4) Arsip buku karya C. Van Vollenhoven (1914), *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*.
- 5) Arsip buku karya C. Van Vollenhoven (1931), *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*.
- 6) Arsip buku karya Martinus Nijhoff (1932), *Adatrechtbundels, XXXV: Sumatra*.
- 7) Arsip buku karya Martinus Nijhoff (1930), *Adatrechtbundels, XXXII: Zuid-Sumatra*.
- 8) Arsip koran *Het Vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad* (11 Agustus 1903).
- 9) Arsip koran *Het vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad* (02 Oktober 1906).
- 10) Arsip majalah penerbit *Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indie's-Gravenhage* (1930), *Koloniaal Tijdschrift, jrg 1930*.
- 11) Arsip majalah penerbit *Algemeene Landsdrukkerij's-Gravenhage* (1904), *Koloniaal Verslag: Nederlandsch-Indie Mededeelingen van Staatkundigen en Algemeenen Aard Koloniaal Verslag*.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yang didapatkan oleh peneliti berasal dari arsip situs web, yaitu *google scholar*. Sumber sekunder peneliti, sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Irmawati Sagala (2020), “Islam dan Adat dalam Sistem Pemerintahan Jambi Masa Kesultanan dan Kolonial Pada Tahun 1855-1942”.
- 2) Buku yang ditulis oleh Sutrisno Kutoyo, Dkk (1978), “Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi”.
- 3) Buku yang ditulis oleh Masjkuri (1979), “Sultan Thaha Syaifuddin”.

3.2.3. Verifikasi Sumber (Kritik)

Verifikasi data (kritik) merupakan upaya untuk memperoleh keaslian dan kredibilitas sumber. Pada tahap ini yang perlu diperiksa adalah validitas keaslian sumber yang diverifikasi oleh kritik eksternal dan validitas kebenaran (kredibilitas) sumber yang dikritik secara internal. Peneliti telah memverifikasi apakah sumber tersebut asli atau tidak (Sumargono, 2021). Pada proses ini kritik dibagi menjadi dua jenis, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk melihat apakah isi sumber tersebut cukup kredibel atau tidak, sedangkan kritik eksternal merupakan kegiatan sejarawan untuk melihat apakah sumber yang didapatkan asli atau tidak (Zulaicha, 2014).

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan verifikasi atau kritik data dengan menyelaraskan pada tahap-tahap yang dikemukakan Zulaicha diatas. Kritik yang dilakukan oleh peneliti, antara lain

1. Autentisitas (Kritik Eksternal)

a. Sumber Tulisan

- 1) Arsip buku karya J. W. J. Wellan (1932), *Zuid-Sumatra Economisch Overzicht*.
- 2) Arsip buku karya Herbert Campen (1939), *De Regeling van Het Rechtswezen in De Buitengewesten*.
- 3) Arsip buku karya J. Tideman (1938), *Djambi*.
- 4) Arsip buku karya C. Van Vollenhoven (1914), *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*.
- 5) Arsip buku karya C. Van Vollenhoven (1931), *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*.
- 6) Arsip buku karya Martinus Nijhoff (1932), *Adatrechtbundels, XXXV: Sumatra*.
- 7) Arsip buku karya Martinus Nijhoff (1930), *Adatrechtbundels, XXXII: Zuid-Sumatra*.
- 8) Arsip koran *Het Vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad* (11 Agustus 1903).
- 9) Arsip koran *Het vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad* (02 Oktober 1906).
- 10) Arsip majalah penerbit *Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indie's-Gravenhage* (1930), *Koloniaal Tijdschrift, jrg 1930*.
- 11) Arsip majalah penerbit *Algemeene Landsdrukkerij's-Gravenhage* (1904), *Koloniaal Verslag: Nederlandsch-Indie Mededeelingen van Staatkundigen en Algemeenen Aard Koloniaal Verslag*.

Sumber data telah diverifikasi oleh peneliti terutama pada kritik yang ditujukan pada warna kertas dokumen arsip dan tinta yang digunakan pada penyusunan dokumen arsip. Warna pada kertas dokumen arsip yang didapatkan oleh peneliti sudah berwarna

kecoklatan dan arsip cenderung buram. Kemudian, pada warna tinta yang digunakan pada dokumen arsip cenderung menggunakan tinta yang berwarna hitam pekat tanpa terdapat tambahan warna pada tinta. Hal ini mendukung autentisitas sumber data terkait kajian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Kredibilitas (Kritik Internal)

a. Sumber Tulisan

- 1) Arsip buku karya J. W. J. Wellan (1932), *Zuid-Sumatra Economisch Overzicht*.
- 2) Arsip buku karya Herbert Campen (1939), *De Regeling van Het Rechtswezen in De Buitengewesten*.
- 3) Arsip buku karya J. Tideman (1938), *Djambi*.
- 4) Arsip buku karya C. Van Vollenhoven (1914), *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*.
- 5) Arsip buku karya C. Van Vollenhoven (1931), *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*.
- 6) Arsip buku karya Martinus Nijhoff (1932), *Adatrechtbundels, XXXV: Sumatra*.
- 7) Arsip buku karya Martinus Nijhoff (1930), *Adatrechtbundels, XXXII: Zuid-Sumatra*.
- 8) Arsip koran *Het Vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad* (11 Agustus 1903).
- 9) Arsip koran *Het vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad* (02 Oktober 1906).
- 10) Arsip majalah penerbit *Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indie's-Gravenhage* (1930), *Koloniaal Tijdschrift, jrg 1930*.
- 11) Arsip majalah penerbit *Algemeene Landsdrukkerij's-Gravenhage* (1904), *Koloniaal Verslag: Nederlandsch-Indie Mededeelingen van*

*Staatkundigen en Algemeenen Aard Koloniaal
Verslag.*

Verifikasi data yang dikemukakan secara internal pada dokumen arsip di atas terletak pada isi arsip, yaitu tentang peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910 serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Jenang.

3.2.4. Interpretasi Data

Fakta yang telah dikumpulkan melalui proses heuristik dan diurutkan berdasarkan keaslian dan kredibilitasnya harus diinterpretasikan terlebih dahulu. Interpretasi atau penafsiran bersifat individual. Perbedaan interpretasi terjadi karena terdapat perbedaan latar belakang, pengaruh, motivasi, pola pikir, dan sebagainya. Kedudukan interpretasi berada di antara verifikasi dan eksposisi (Sumargono, 2021). Tahap interpretasi sangat penting karena merupakan langkah terakhir yang dilakukan sebelum penulisan sejarah. Pada tahap ini akan dijelaskan sumber-sumber sejarah yang berhasil dikritisi dan tentunya dijadikan dokumen penulisan sejarah. Kuntowijoyo berpendapat bahwa seorang sejarawan harus mampu membayangkan apa yang terjadi, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang terjadi sesudahnya (Sukmana, 2021).

Menurut Kuntowijoyo, interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti penjelasan dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti kesatuan. Analisis dan sintesis dianggap sebagai metode utama interpretasi. Menurut Syamsuddin, teknik analisis data sejarah adalah analisis data yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah (Herlina, 2011). Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya dengan cara mengkategorikan data-data. Langkah-langkah yang dilakukan penulis saat menganalisis data adalah mengumpulkan data kemudian mengelompokkan data sesuai dengan permasalahannya. Dalam menganalisis data atau sumber, kritik eksternal

dan kritik internal diperlukan untuk menentukan kredibilitas dan otentisitas sumber.

Pada tahap ini peneliti berusaha menafsirkan data-data yang telah diuji pada tahap kritik eksternal maupun internal seobjektif sampai menghasilkan rangkaian tulisan sejarah yang konkret. Peneliti pada tahap ini diharuskan untuk berhati-hati dan integrasi peneliti untuk menghindari dari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Setelah melalui tahap kritik, kemudian data-data akan dituliskan secara kronologis sesuai dengan topik penelitian, yaitu peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910.

3.2.5. Historiografi

Tahap terakhir dari metode penelitian sejarah adalah penulisan sejarah atau historiografi. Penulisan sejarah harus mengikuti kaidah logika dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulisan sejarah juga merupakan karya sastra yang memerlukan kejelasan struktur dan gaya bahasa, penekanan, dan retorika tertentu (Sumargono, 2021). Dalam hal ini, penulisan sejarah adalah puncak dari segalanya karena hal yang ditulis adalah peristiwa sejarah. Melalui pencatatan sejarah diharapkan peristiwa-peristiwa yang ada dapat terekam dengan jelas dan diwariskan kepada generasi mendatang (Padiatra, 2020).

Pada tahapan historiografi ini penulis akan menyusun data-data berdasarkan dengan sumber-sumber yang telah didapatkan melalui tahapan-tahapan sebelumnya menjadi sebuah rangkaian yang sesuai dengan kronologis dan sejarah yang sesuai dengan penelitian penulis. Dalam hal ini yang akan dirangkai menggunakan historiografis adalah hasil sumber-sumber kajian yang membahas tentang peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai, peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910, yaitu:

1. Djenang berperan sebagai pemungut pajak pada Tahun 1900-1910. Hasil hutan yang dikumpulkan oleh masyarakat Djambi dan Suku Koeboe Djinaq (Suku Anak Dalam) kepada pemilik tanah (sultan) dengan harga sebagai *djadjah* (pajak). Pada masa Kesultanan Djambi, secara hukum masyarakat Djambi dibedakan berdasarkan fungsi dan kewajiban membayar jenis pajak disebut dengan *djadjah* (pajak). Peran Djenang di Djambi pada masa Kesultanan Djambi pada Tahun 1900-1904, yaitu sebagai pemungut *djajah* (pajak), sebagai wakil sultan, dan sebagai lembaga peradilan. Sedangkan Djenang memiliki perbedaan peran pada masa Pemerintahan Belanda pada Tahun 1906-1910. Djenang berperan sebagai pengendali atau pengawas setiap wilayah-wilayah di Djambi. Pada masa Pemerintahan Belanda rakyat Djambi mengalami kesengsaraan akibat dari kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Belanda. Terutama pada tekanan pajak di wilayah Djambi yang mengalami masa depresi.
2. Djenang memiliki perbedaan dan persamaan pada masa Kesultanan Djambi dan Pemerintah Belanda. Selain itu sistem pemerintah dan sistem politik di Djambi mengalami perubahan. Perbedaan tersebut yaitu terletak pada peran Djenang pada masa Kesultanan Djambi menjadi wakil sultan dan pemungut pajak, namun pada masa Pemerintah Belanda menjadi peran pemungut pajak. Persamaan Djenang pada masa Pemerintah Kesultanan Djambi dengan Pemerintah Belanda yaitu terletak pada lama jabatan Djenang tersebut, yaitu lima tahun.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai masukan, diantaranya, yaitu:

1. Bagi peneliti

Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut terkait peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910, hal tersebut perlu dilakukan karena masih terdapat aspek lain yang perlu dikaji lebih lanjut terkait peran Djenang salah satunya peran Djenang terhadap aspek ekonomi mengenai pajak yang dipungut oleh sosial, serta aspek sosial dalam berbagai perspektif lainnya.

2. Bagi pembaca

Diharapkan pembaca dapat memahami mengenai peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910. Selain itu juga, hasil dari penelitian ini untuk dapat mengetahui peran Djenang di Djambi pada Tahun 1900-1910.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifah, Y. N. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3 (1). Hal 51-60.
- Afriadi. (2018). *Peranan Majelis Taklim dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Program Pascasarjana (PPs).
- Andra, Y. (2019). Naskah Naskah Kuno Di Provinsi Jambi Sebagai Sumber Arkeologi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 9 (2). Hal 277-284.
- Apriliani, R., & Seprina, R. (2023). Perjuangan Sultan Thaha Syaifuddin Terhadap Kolonial Belanda di Jambi (1855-1904): Study Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2 (2). Hal 104-118.
- Ardita, R. D., & Rukmana, L. (2023). Pengaruh Politik Kolonial Dan Desentralisasi Di Daerah Jambi 1906-1942. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 2 (2). Hal 180-187
- Beck, H. J. L. (1919). *Boschbouw en boschexploitatie in Zuid-Sumatra*. Nederlandsch: Zuid-Sumatra Landbouw- en Nijverheids-vereeniging.
- Boer, J. G. de. (1931). *Pandecten Van Het Adatrecht*. Amsterdam: De Busy.
- Brandes, J. L. A. (1905). Opstellen. In *Uitgave Ter Gelegenheid Van De Herenking Van Zijn Sterfdag*. Nederlandsch: Instituut Kern Leiden.
- Campen, H. (1939). *De Regeling Van Het Rechtswezen in de Buitengewesten*. Den Haag: Drukkerij M. Uleman.
- De Boer, M. G. (1915). *Dertigste Jaargang*. Groningen: Geschiedenis, Land-en Volkenkunder.
- Disvia, F. M., Purnomo, B., & Meihan, A. M. (2024). Jambi Masa Kolonialisme dan Imperialisme Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah: Study Kasus Kepemimpinan H . Ismail pada Masyarakat Kerinci dalam Perjuangan

- Melawan Belanda (1903-1925). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (1). Hal 10096-10110.
- Erdianto. (2010). Perkembangan Kelembagaan dari Negeri dan Marga menjadi Desa di Kecamatan Tungkal Ulu kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2). Hal 1-34.
- Habibah, E. N. F. (2018). *Hubungan Antara Harapan dengan Kepuasan Hidup Pada Polisi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Fakultas Psikolog dan Kesehatan.
- Harun, H., & Sagala, I. (2013). Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo. *Jurnal Kontekstualita*, 28 (1). Hal 79-118.
- Hasselt, V. (1882). *Silsilah (Raja-Raja) Jambi*. Nederlandsch: Leiden University.
- Herlina, N. (2011). *Metode sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Houten, P. J. Van. (1890). *Handleiding Voor De Papercultuur*. Amsterdam: J. H. De Bussy.
- Hugiono, & Poerwantana, P. K. (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Juliana, R. (2023). *Integrasi Orang-Orang Keturunan Arab di Kesultanan Melayu Jambi dalam Menghadapi Kolonial Belanda (1885-1904)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Fakultas Adab dan Humaniora.
- Kemp, P. H. Van Der. (1920). *Sumatra in 1818*. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Kielstra, E. B. (1910). *Indisch Nederland*. Harleem: De Erven F. Bohn.
- Kol, H. H. (1912). *De Koeboes*. Nederlandsch: Leiden University.
- Kol, H. Van. (1911). *Jederlandsch-Indie iin De Staten-Generaal van 1897 Tot 1909*. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Koloniaal Tijdschrift, jrg 1930*. (1930). Nederlandsch-Indie's-Gravenhage: Vereeniging van Ambtenaren Bij Het Binnenlandsch Bestuur.
- Kutoyo, S., Kartadramadja, M. S., Gonggong, A., Safwan, M., Masjkuri, Surachman, Ibrahim, M., Sutjiatiningsih, S., & Hitipeuw, F. (1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*. Jambi: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Laely, N. (2018). Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942. *Jurnal Pendidikan*, 1 (3). Hal 1-20
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan

- Perencanaan Pembangunan Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (48). Hal 1-9.
- Lisseneini, N. Y., & Siregar, I. (2022). Proses Islamisasi Pada Masa Kerajaan Melayu Jambi. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1 (3). Hal 42-52
- Margono, H., Mujilan, & Chaniago, J. R. (1984). *Sejarah Sosial Jambi: Jambi sebagai Kota Dagang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Maru'ao, W. S. (2023). Strategi Kepala Sekolah Dalam Membangun Budaya Religius Di SMP PAB 8 Sampali Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Malay-Manajemen Pendidikan Islam & Budaya*, 3 (1). Hal 1-12.
- Masjkuri. (1979). *Sultan Thaha Syaifuddin*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muniroh, A. (2018). Hope Dan Optimisme: Diskursus Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 1 (1). Hal 1-9.
- Murdani, R. (2023). *Hukum tentang ketentraman publik di jambi tahun 1900-1930*. Universitas Jambi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Muslimin, A. (1996). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatra Selatan*. Sumatra Selatan: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatra Selatan.
- Muzakir, A. (2013). Kisah Orang Turki dalam Sejarah Islam di Jambi. *Jurnal Thawafiyat*, 14 (2). Hal 293-308.
- Nieuwenhuis, A. W., Kamerling, Z., Reitsma, S. A., Escher, B. G., & Kesler, C. K. (1936). Tropisch Neerlandsch. *Veertiendaagsch Tijdschrift Ter Verbreiding van Kennis Omtrent Nederlandsch Oost En West-Indie*, 9 (6). Hal 83-99.
- Nijhoff, M. (1922). *Adatrechtbundels XX: Sumatra en Riau*. S-Gravenhage: Bibliotheca University.
- Nijhoff, M. (1930). *Adatrechtbundels, XXXII: Zuid Sumatra*. S-Gravenhage: Universitatis Bibliotheca.
- Nijhoff, M. (1932). *Adatrechtbundels XXXV: Sumatra*. S-Gravenhage: Bibliotheca University.
- Nijhoff, M., & Reyn, C. A. van. (1903). *Het Vaderlanda, Staat-en Letterkundig Nieuwsblad*. Amsterdam
- Notosusanto, N. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

- Nur, M. S., & Uyun, A. S. (2020). *Tinjauan Pustaka Sistematis*. Klaten: Lakeisha.
- Obdeijn, V. (1942). *De geografische kennis omtrent Sumatra in de middeleeuwen*. Nederlandsch: Brill.
- Padiatra, A. M. (2020). *Ilmu Sejarah : Metode Dan Praktik*. Gresik: JSI Press.
- Pasaribu, R. K., Lestari, I., Yanti, R., Kautsar, Z. Al, Damin, S., Indah, P., & Pasaribu, A. (2023). Dualisme Kesultanan di Jambi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Abad 17-18. *Jurnal Siginjai*, 3 (2). Hal 106-118.
- Prasetijo, A. (2018). Memahami Hubungan Orang Ruimba dan Waris-Jenang dalam Konteks Teori Praktek. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2 (1). Hal 1-10.
- Puspitasari, A. (2022). Bahasa Dan Kebudayaan Masyarakat Melayu Jambi Masa Kesultanan Jambi. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1 (3). Hal 74-82.
- Rahim, A. (2022). Kerajaan Jambi dan Pengaruh Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22 (3). Hal 1811-1823.
- Richter, J. F. P. (1910). *Rapport Staatsspoorwegen in Zuid-Sumatra*. Batavia: Landsrukkerij.
- Rinaldi, D. R. (2023). Jambi Masa Kolonialisme Dan Imperialisme Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah: Study Kasus Perkembangan Kota Modern Muaro Tembesi (1906-1942). *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 3 (1). Hal 1-10.
- Ronkel, V. (1930). *Meleisch Woordenboek*. Den Haag: G. B. Van Goor Zonen's.
- Rosyadi, R. U., & Pradjoko, D. (2023). Strategi Sultan Thaha Syaifuddin dalam Melawan Penetrasi Belanda di Kesultanan Jambi (1855-1904). *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 13 (2). Hal 595-608.
- Royen, J. W. Van. (1927). *De Palembangse Marga en Haar Grond-en Waterrechten*. Leiden: Ardriants Boeknadel.
- Sagala, I. (2020). Islam dan Adat dalam Sistem Pemerintahan Jambi Masa Kesultanan dan Kolonial Pada Tahun 1855-1942. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Program Studi Pengkajian Islam.
- Sagala, S. (2010). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sagimun, Abu, R., Sofiun, A., Melalatoa, J., Swasono, M., Rosmalawati, Murniatmi, G., Tobing, N., Sjamsidar, & Parwieningrum, E. (1977). *Adat Istiadat Daerah Jambi*. Jambi: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sari, R. A. W. (2015). Pelaksanaan Pajak Minimum Keras di Jambi Tahun 1885-

1936. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3 (2). Hal 1-12.
- Sasoko, D. M. (2022). Pentingnya Perencanaan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21 (2). Hal 83-89.
- Satria, O. (2020). the Fatwa of Smoking in the Kerinci Manuscripts. *Jurnal Penamas*, 33 (2). Hal 277-292.
- Schrieke, J. J. (1921). *De Lagere Inlandscje Rechtsgemeenschappen in Nederlandsch-Indie*. Weltevreden: Commissie voor de Volkslectuur.
- Sevenhoven, J. J. van. (1822). *Beschrijving vande Hoofdplaats van Palembang*. Nederlandsch: Commisfaris van liet Nederlandsch.
- Sholekhah, S., & Seprina, R. (2022). Jambi Masa Kolonialisme Imperialisme Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah : Study Kasus Kawasan Pusat Kota Pemerintahan Belanda Di Jambi Tahun 1906-1942. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 1 (2). Hal 1-17.
- Sianipar, I. M. (2022). Analisis Kepemimpinan Sultan Thaha Saifuddin Dalam Perlawanan Terhadap Belanda di Jambi. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 1 (1). Hal 94-100.
- Soedjaji, R. (2000). *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstataasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het jaar 1903*. (1904). Batavia: Landsdrukkerij.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het jaar 1905*. (1906). Batavia: Landsdrukkerij.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het jaar 1906*. (1907). Batavia: Landsrukkerij.
- Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1 (2). Hal 1-5.
- Sumargono. (2021). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Sumarni, N. (2022). Sejarah kesultanan jambi menurut naskah “ini sajarah kerajaan jambi.” *Malay Studies: History, Culture and Civilization*, 1 (1). Hal 1-17.

- Supian, Fatonah, & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2 (2). Hal 10-19.
- Suryani, W. S. (2021). *Peranan Rio dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada Masa Keresidenan Belanda (1906-1925)*. Universitas Batanghari Jambi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Susanti, F. S. (2022). *Kedudukan Kaum Bangsawan Jambi Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Universitas Batanghari Jambi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Syaputra, D. Z. E. (2020). Sultan dan Islam (Peran Kesultanan Jambi dalam Islamisasi di Kerinci). *Jurnal Keislaman Dan Perdaban*, 14 (1). Hal 1-13.
- Taufiqurokhman. (2008). Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*. Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Tideman, J. (1938). *Djambi Bewerkt*. Amsterdam: Durk de Bussy.
- Transiska, Ri. (2018). *Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda Respon Umat Islam di Jambi (Tahun 1915-1942)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Adab dan Budaya.
- Verbeek, W. (1909). *Politiek Beleid en Bestuurzorg In De Buitenbezittingen*. Batavia: Landsrukkerij.
- Veth, P. J. (1882). *Midden Sumatra: Reizen en Onderzoekingen der Sumatra-Expeditie, Uitgerust Door Het Aardjkskunfig Genootschap*. Leiden: KIT Royal Tropical Institute.
- Vollenhoven, C. V. (1931). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*. Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill.
- Wardah, E. S. (2014). Metode Penelitian Sejarah. *Jurnal Tsaqofah*, 12 (2). Hal 163-175.
- Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). *Metode penelitian sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Wellan, J. W. J. (1932). *Zuid-Sumatra: Economisch Overzicht van De Gewesten Djambi, Palembang, De Lampoengsche Districyen en Benkoelen*. Weginegen (Holland): H. Veenman & Zonen.
- Wulandari. (2016). *Penggunaan Hak Memilih Suku Anak Dalam Muara Kilis Jambi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014*. Universitas Diponegoro: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

- Wulandari, M. A., Nurdin, F., Adiguna, R. S., Damin, M. S., Fitri, D. N., & Yanti, R. (2022). Pemerintahan dan Politik Etis Serta Penerapannya di Jambi. *Jurnal Sejarah*, 2 (2). Hal 14-26.
- Wulandari, W., & Seprina, R. (2022). Jambi Masa Kolonialisme Dan Imperialisme Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah: Studu Kasus Perkembangan Kota Modern Muaro Tembesi (1906-1942). *Jurnal Pendidikan & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1 (2). Hal 38-51.
- Yulita, O., & Nofra, D. (2018). Perlawanan Kesultanan Melayu Jambi Terhadap Kolonial Belanda: Kasus Sultan Muhammad Fachruddin (1883-1884 M) dan Sultan Thaha Syaifuddin (1855-1904 M). *Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2 (2). Hal 73-85.
- Zulaicha, L. (2014). *Metologi sejarah*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora.